

BAB I

PENDAHULUAN

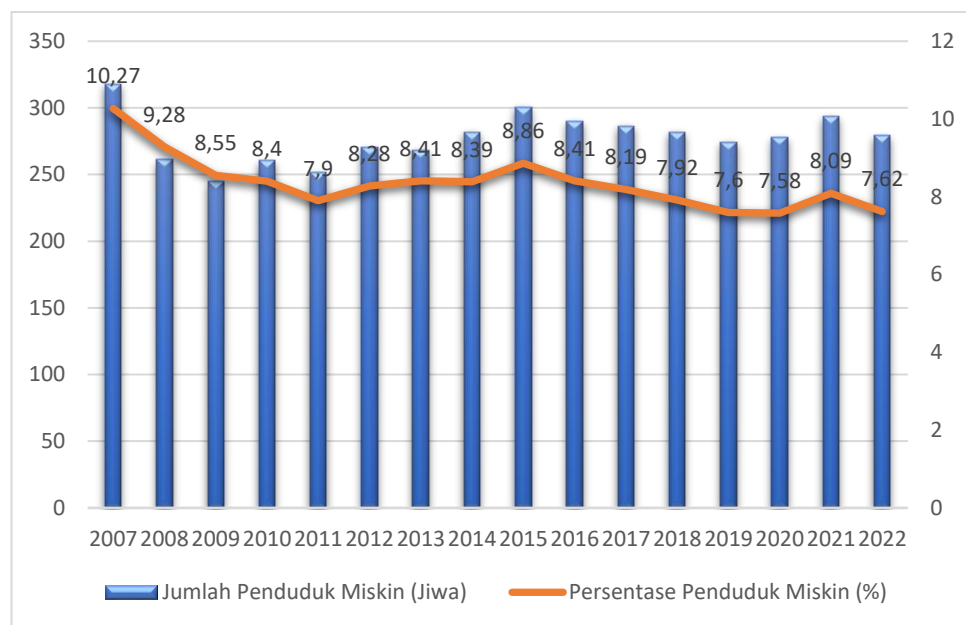
1.1 Latar Belakang

Saat ini, globalisasi menarik perhatian global dan pemerintah di seluruh dunia, dengan isu kemiskinan menjadi fokus utama perhatian pemerintah di semua negara (Badan Pusat Statistik, 2021). Dalam situasi global yang kompleks, masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi berbagai tantangan. Namun, penting untuk diingat bahwa pembangunan nasional memiliki dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi (Nurjannah, 2022). Kondisi kemiskinan di Indonesia bisa disajikan melalui tiga sudut pandang berbeda, yaitu kemiskinan yang bersifat inheren, kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur, dan disparitas antar daerah. Tingginya tingkat pengangguran lebih disebabkan oleh keterbatasan akses dan kesempatan pekerjaan yang terbatas (Ningrum, 2017). Untuk menyelesaikan tantangan ini, perlu diadopsi pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dengan menggabungkan berbagai bidang ilmu dan strategi pemberdayaan. Namun, upaya penanganan yang dilakukan hingga saat ini cenderung terbatas dan tidak berkelanjutan.

Bank Dunia telah mengganti standar lamanya yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan menggunakan perhitungan yang lebih baru, yaitu melalui ukuran paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) pada tahun 2023. Pada basis perhitungan baru, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US\$ 2,15 per orang per hari atau Rp 32.745 per hari. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, garis kemiskinan diidentifikasi sebagai pengeluaran per individu kurang dari Rp 550.547 per bulan. Artinya, penduduk dengan jumlah pengeluaran kurang dari itu akan masuk kategori miskin. Angka tersebut naik 2,78 persen dibandingkan periode September 2022 dan naik 8,90 dibandingkan periode Maret 2022. Panduan mengenai kebutuhan dasar pangan menyarankan konsumsi minimal sebesar 2.100 kilo kalori per orang per hari, sementara pengeluaran minimum untuk non-pangan mencakup kebutuhan akan perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Hardinandar (2019), kemiskinan adalah ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian,

perawatan kesehatan, dan tempat tinggal. Pada 2022, Provinsi Jambi memiliki 279.370 penduduk miskin, turun dari 317.800 pada 2007. Penurunan ini sejalan dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 10,27% pada 2007 menjadi 7,62% pada 2022.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan dinilai berdasarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Handbook on Poverty Inequality* dari Bank Dunia. Ini mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan dan keperluan penting lainnya, yang dinilai melalui pola pengeluaran.



Sumber: BPS Provinsi Jambi Tahun 2007-2022.

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi Tahun 2007-2022 (%)

Pada 2022, pemerintah berhasil kurangi orang miskin di Indonesia sebesar 0,47%. Grafik 2 menunjukkan penurunan persentase orang miskin tahun 2021 berdampak pada Indeks Kedalaman Kemiskinan, menunjukkan penurunan pengeluaran per individu miskin.

Tabel 1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (%).

Tahun	Kedalaman Kemiskinan (%)
2018	1,30
2019	1,23
2020	1,10
2021	1,29
2022	1,17

Sumber : BPS Jambi (2022)

Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 1.2, terlihat bahwa Jambi mengalami variasi dalam tingkat kedalaman kemiskinan selama periode tersebut. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 1,30%, sementara titik terendahnya tercatat pada tahun 2020 dengan angka 1,10%. Tingkat kedalaman kemiskinan yang tinggi di suatu daerah seringkali dikaitkan dengan rendahnya pendapatan per kapita, kurangnya peluang kerja yang memadai, infrastruktur yang terbatas, serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan. Pada tahun 2009, dirilis Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 yang mengatur koordinasi dalam upaya mengatasi kemiskinan. Dokumen tersebut menekankan bahwa strategi nasional untuk menangani kemiskinan bertumpu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Pasal 2). Kemudian, pada tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 dikeluarkan dengan maksud mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pendekatan kebijakan dalam peraturan ini memiliki perbedaan signifikan dengan yang sebelumnya disusun.

Jika sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik, pertumbuhan populasi dapat menjadi sumber daya pembangunan yang berharga, namun bila kualitasnya rendah, pertumbuhan tersebut dapat menjadi kendala bagi pembangunan (Astuti, 2015). Peningkatan populasi di tiap wilayah merupakan salah satu pemicu utama kemunculan kemiskinan di wilayah tersebut (Halim *et al.*, 2022). Peningkatan kepadatan penduduk juga berdampak pada tingkat

pengangguran karena semakin banyaknya orang yang tersedia untuk bekerja. Dengan bertambahnya populasi, jumlah individu yang aktif mencari pekerjaan juga meningkat. Di sejumlah negara berkembang, pertumbuhan kepadatan penduduk seringkali melebihi kesempatan kerja yang tersedia. Ini berarti tidak semua orang yang mencari pekerjaan bisa mendapatkannya, sehingga timbul masalah pengangguran (Astuti *et al.*, 2019).

Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (Jiwa/km²).

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2018	71
2019	72
2020	66
2021	72
2022	74

Sumber: BPS Provinsi Jambi (2022)

Berdasarkan informasi pada tabel 1.3 yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kedalaman kemiskinan terlihat bahwa kepadatan populasi penduduk mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun 2018 hingga 2022. kepadatan penduduk tertinggi ada pada tahun 2019 yaitu 72 jiwa/km². Fenomena ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor, termasuk peningkatan angka kelahiran. Kualitas tenaga kerja krusial dalam kemiskinan. Dan kepadatan penduduk terendah terjadi pada 2020 yaitu 66 jiwa/km², ini terjadi dikarenakan terutama karena luas wilayah yang besar, sebagian besar wilayahnya terdiri dari hutan dan perkebunan, serta perekonomian yang berbasis agraris. Urbanisasi di Jambi juga terbatas, dan provinsi ini bukan tujuan utama migrasi. Meskipun pandemi COVID-19 membawa dampak sementara, seperti pembatasan mobilitas dan perubahan pola kelahiran, faktor-faktor struktural seperti geografis dan ekonomi lebih dominan dalam menentukan rendahnya kepadatan penduduk di sana. Malthus menyoroti ketidakseimbangan antara pertumbuhan

populasi dan sumber daya alam, menyebabkan kekurangan yang mendorong orang ke kemiskinan (Muhammad, *at al.*, 2023).

Pengeluaran pada bidang pendidikan dan kesehatan akan memberikan dampak yang lebih besar bagi individu yang hidup dalam kemiskinan daripada bagi mereka yang tidak, sebab bagi yang miskin, pekerjaan fisik merupakan aset kunci. Ketersediaan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang terjangkau akan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan, sebagai hasilnya, menaikkan pendapatan secara signifikan. Menurut penelitian sebelumnya oleh (Tumpal, 2013), Oleh karena itu, dalam usaha untuk memajukan perekonomian tidak sekadar fokus pada peningkatan pendapatan semata, melainkan juga mengutamakan aspek kualitatif dalam proses pembangunan.

Ketidakmampuan ekonomi juga dapat disebabkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran adalah permasalahan yang umum terjadi di berbagai wilayah. Pengangguran Terbuka mengacu pada individu yang telah memasuki pasar kerja namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan, sedang berusaha mencari pekerjaan baru, merencanakan untuk berwirausaha, atau telah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.

Perubahan dramatis di pasar kerja tanpa peningkatan yang seimbang dalam peluang pekerjaan telah menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran. Hal ini menyebabkan kehilangan pekerjaan yang pada akhirnya mengurangi pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai hasilnya, tingkat kemiskinan akan meningkat seiring dengan peningkatan pengangguran.

Tabel 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (%).

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2018	3,73
2019	4,06
2020	5,13
2021	5,09
2022	4,59

Sumber: BPS Provinsi Jambi (2022)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jambi, terjadi penurunan yang cukup mencolok dalam jumlah orang yang tidak bekerja antara tahun 2021 dan 2022, dari 5,13% menjadi 5,09%. Hal ini menandakan adanya perbaikan yang signifikan dalam kondisi ketenagakerjaan, menunjukkan sebuah tren positif dalam mengatasi masalah pengangguran. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, sementara jumlah terendah terjadi pada tahun 2020 dengan 5,13%.

Angka pengangguran yang tinggi berpotensi mengakibatkan penurunan tingkat kekayaan dan kesejahteraan dalam suatu komunitas. Seiring dengan bertambahnya populasi, jumlah pekerja juga meningkat, namun peluang kerja tidak sejalan dengan pertumbuhan tersebut. Keterbatasan lapangan kerja mengakibatkan persaingan ketat di antara para pencari kerja, yang pada akhirnya menyebabkan sebagian dari mereka gagal memperoleh pekerjaan dan terpaksa menganggur (Soeharjoto, 2021).

Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (%).

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2018	70,65
2019	71,26
2020	72,29
2021	72,62
2022	73,11

Sumber: BPS Provinsi Jambi (2022).

Dari informasi yang tercantum dalam tabel, terdapat perkembangan positif dalam perbaikan pembangunan manusia di Indonesia seiring berjalannya waktu. Dimana indeks pembangunan manusia tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 73,11% dan yang terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 70,65%. Idealnya, pertumbuhan dalam pengembangan sumber daya manusia harus disertai dengan peningkatan produktivitas masyarakat. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan di Jambi menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Meskipun

terjadi penurunan pada tingkat kemiskinan di beberapa periode, fluktuasi tersebut sering kali diikuti oleh peningkatan sebelum kembali menurun.

Indeks Kesejahteraan Manusia (IKM) merupakan sebuah parameter yang mengevaluasi kemajuan pembangunan manusia melalui berbagai faktor esensial dalam kehidupan yang mempengaruhi produktivitas individu. Kurangnya kemampuan dan kompetensi dalam mengelola keuangan daerah seringkali berdampak negatif, seperti rendahnya standar pelayanan kepada masyarakat dan ketidakmampuan untuk meningkatkan IKM (Harliyani, 2016). Fluktuasi pengangguran menyoroti pentingnya memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan selama pembangunan. Tingkat kemiskinan terkait erat dengan pembangunan manusia, yang diukur dengan Indeks Kesejahteraan Manusia (IKM). IKM memainkan peran kunci dalam kemajuan ekonomi saat ini karena pertumbuhan manusia yang baik dapat meningkatkan penggunaan optimal sumber daya produksi. Tingkat kualitas masyarakat yang tinggi mendorong inovasi dan peningkatan dalam penggunaan sumber daya produksi yang ada (Susanto & Lucky, 2018). Jika indeks pembangunan manusia (IPM) suatu daerah tinggi, ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan kemungkinan mengurangi jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan (Ardian *et al.*, 2021).

Tabel 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022 (%).

Tahun	Pertumbuhan ekonomi (%)
2018	4,69
2019	4,35
2020	-0,51
2021	3,70
2022	5,12

Sumber: BPS Indonesia (2022).

Salah satu indikator penting untuk menilai kinerja perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi, terutama untuk menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 5,12% dan yang terendah terjadi pada tahun

2020 yaitu -0,51%. Se jauh mana aktivitas ekonomi dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu disebut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat yang cukup untuk upaya peningkatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihasilkan dari peningkatan output agregat, yaitu barang dan jasa, atau PDRB setiap tahun. Disebut sebagai kondisi yang diperlukan, ini berarti pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) harus meningkat lebih banyak daripada laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan distribusi pendapatan yang merata atau equity, sehingga peningkatan pendapatan suatu negara berdampak pada peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Ini disebut sebagai syarat yang cukup.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi Jumlah Penduduk yang Hidup dalam Kemiskinan di provinsi Jambi dari 2018 hingga 2022. Ketidacukupan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja penduduk, menyebabkan penurunan pendapatan mereka. Dengan demikian, rendahnya pendapatan akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang miskin. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh kepadatan penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kondisi perkembangan kedalaman kemiskinan terhadap kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018-2022.
2. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap kedalaman kemiskinan di Provinsi Jambi pada tahun 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis perkembangan kedalaman kemiskinan terhadap variabel kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 hingga 2022.
2. Menilai pengaruh kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap kedalaman kemiskinan di Provinsi Jambi dari tahun 2018 hingga 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat akademis meliputi kontribusi terhadap kemajuan pengetahuan dan penelitian lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan yang berguna untuk memperluas pemahaman dalam bidang ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi pembangunan, serta memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan atau melengkapi studi tentang masalah kemiskinan.
- b. Manfaat Praktis, secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat:
 1. Bagi Pengambil Kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumber informasi berharga terutama bagi pemerintah daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada evaluasi kebijakan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di wilayah tersebut.
 2. Bagi Penulis kegiatan riset ini merupakan kesempatan berharga untuk memperkaya pengetahuan serta meningkatkan keterampilan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang dampak kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap kedalaman kemiskinan di Provinsi Jambi.